

IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA (KB) DI RT. 01 KELURAHAN GUNUNG LINGAI KOTA SAMARINDA

Muhammad Alfath Akbar, Enos Paselle, Santi Rande

**eJournal Administrasi Publik
Volume 11, Nomor 1, 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di RT.01 Kelurahan Gunung Lingai Kota Samarinda

Pengarang : Muhammad Alfath Akbar

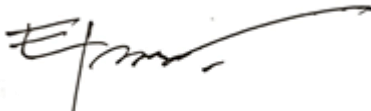
NIM : 1602015039

Program : S1 Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program S1 Administrasi Publik Fisip Unmul.

Pembimbing I,



Dr. Enos Paselle, M.AP
NIP. 19740524 200501 1 002

Samarinda, 24 Januari 2023

Pembimbing II,



Dr. Santi Rande, M.Si
NIP. 19751001 200604 2 001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL S1 ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Administrasi Publik	
Volume : 11	
Nomor : 1	
Tahun : 2023	
Halaman : 188-198	
Koordinator Prodi S1 Administrasi Publik Dr. Fajar Apriani, M.Si NIP. 19830414 200501 2 003	

IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA (KB) DI RT. 01 KELURAHAN GUNUNG LINGAI KOTA SAMARINDA

Muhammad Alfath Akbar ¹, Enos Paselle ², Santi Rande ³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di RT.01 Kelurahan Gunung Lingai Kota Samarinda, serta untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukungnya. Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan fokus penelitian, yaitu, komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi, dengan memperhatikan faktor penghambat dan pendukungnya. Dalam penelitian ini yang menjadi key informan adalah Kepala Bidang Bidang Penyuluhan dan Penggerak (P2) serta Kepala Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Samarinda. Teknik analisis data menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa dari komunikasi, belum dapat berjalan dengan baik antar pihak pelaksana Program Kampung KB Madu Kencana. Sumberdaya manusia masih belum maksimal dan anggaran yang kurang memadai. Disposisi merupakan karakteristik yang menempel kepada pelaksana kebijakan dengan komitmen pihak pelaksana Program Kampung KB yang ingin mengaktifkan kembali Program Kampung KB Madu Kencana. Struktur birokrasi, mekanisme implementasi program sudah ditetapkan melalui standar operating prosedur SOP, dengan kerangka kerja yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami sebagai acuan pengurus Kampung KB Madu Kencana Kelurahan Gunung Lingai.

Kata Kunci : *Kampung Keluarga Berencana, Program Keluarga Berencana.*

Pendahuluan

Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk. Jumlah penduduk selalu dipengaruhi oleh jumlah bayi yang dilahirkan (pertumbuhan penduduk) tetapi juga oleh jumlah kematian (penurunan penduduk) pada semua kelompok umur. Pada saat yang sama, migrasi juga memegang peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan penduduk, pendatang (imigran) menambah jumlah penduduk dan

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: alfathakbar1998@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

pendatang mengurangi jumlah penduduk. (Mantra, 2003). Pertumbuhan penduduk yang cepat memperlambat laju pembangunan di berbagai daerah. Untuk mengatasi masalah pertumbuhan penduduk, pemerintah Indonesia mencanangkan Program Keluarga Berencana (KB) yang bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk Indonesia.

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan bagian penting dari Program Pembangunan Nasional dengan tujuan kesejahteraan ekonomi, spiritual, dan sosial budaya masyarakat Indonesia demi keseimbangan yang baik dengan kemampuan produktivitas nasional (Depkes,1999). Seiring berjalannya waktu, program KB telah berkembang dan menciptakan program yang dinamakan program Kampung Keluarga Berencana. Kampung KB merupakan salah satu program yang digagas oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2016.

Tujuan pelaksanaan program Kampung KB adalah untuk mengatasi berbagai kondisi obyektif masalah kependudukan, yang terbagi dalam empat topik strategis, antara lain pengendalian penduduk, pembangunan kualitas penduduk, pengendalian mobilitas penduduk, dan pengembangan sistem informasi dan manajemen kependudukan. Tahun 2010, kota Samarinda terbagi menjadi 10 kecamatan, yaitu: Samarinda Seberang, Loa Janan Iilir, Sungai Kunjang, Samarinda Ulu Palaran, Samarinda Iilir, Samarinda kota, Sambutan,, Samarinda Utara dan Sungai Pinang. Saat ini sudah ada 59 kecamatan di Kota Samarinda yang telah melaksanakan program Kampung KB, termasuk kecamatan Gunung Lingai.

Di Kecamatan Sungai Pinang khususnya di Kelurahan Gunung Lingai terdapat 23 RT dan salah satunya RT.01 sudah melaksanakan Program Kampung Keluarga Berencana di RT. 01 pada tahun 2017, selain ditunjuk oleh Kelurahan Gunung Lingai sebagai tuan Rumah Kampung Keluarga Berencana (KB), wilayah RT.01 memenuhi kriteria persyaratan Kampung Keluarga Berencana (KB). Tujuan dilaksanakannya Kampung Keluarga Berencana adalah untuk meningkatkan kepedulian dan peran masyarakat melalui upaya pendewasaan usia perkawinan, dan peningkatan kesejahteraan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Kampung Keluarga Berencana juga sebagai program pemerintah untuk mengendalikan laju angka kelahiran dan pertumbuhan penduduk yang semakin tahun semakin meningkat.

Adapun kegiatan Program Kampung KB RT 01 Kelurahan Gunung Lingai adalah menjalankan 8 fungsi keluarga yang terdiri dari Fungsi agama, Fungsi pendidikan, Fungsi cinta kasih, Fungsi perlindungan, Fungsi ekonomi, Fungsi reproduksi, Fungsi lingkungan hidup dan Fungsi sosial budaya. Namun, temuan peneliti di lapangan terdapat tiga fenomena dari implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di RT. 01 Kelurahan Gunung Lingai Kota Samarinda.

Pertama, implementasi Program Kampung KB Madu Kencana menjadi semi aktif. Hal ini terkendala terjadinya pandemi covid-19 yang membatasi semua aktivitas yang sifatnya tatap muka langsung kepada masyarakat dalam

memberikan baik penyuluhan maupun sosialisasi terkait program Kampung Keluarga Berencana (KB), sehingga program tidak dapat berjalan dengan baik meskipun dilaksanakan tapi dalam jumlah sangat terbatas. Kedua, didalam mekanisme operasionalnya kurangnya komunikasi antar anggota pelaksana/pengurus. Hal ini juga terkait masih adanya aturan dari pemerintah untuk tidak melaksanakan pertemuan dengan melibatkan masyarakat secara bebas, dan harus memenuhi standar dari team covid-19 Kelurahan Gunung Lingai. Ketiga, fungsi keluarga yang berjalan hanya sebagian saja. Hal ini juga terkendala dengan terbatasnya pertemuan dan isolasi mandiri terhadap dampak yang terkena covid-19, sehingga pertemuan fungsi keluarga sebagai alat komunikasi tidak berjalan dengan baik.

Dari tiga hal yang dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi Kampung KB Madu Kencana masih ada beberapa hal yang tidak diperhatikan dan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang ada. Berdasarkan penjabaran diatas penulis tergerak untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di RT. 01 Kelurahan Gunung Lingai Kota Samarinda” yang diharapkan melalui penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya keterlibatan keluarga untuk mengikuti program Kampung KB demi terbentuknya keluarga yang sejahtera.

Kerangka Dasar Teori

Implementasi Kebijakan

Implementasi secara umum diartikan sebagai pelaksanaan. Implementasi kebijakan mengacu pada kegiatan implementasi kebijakan aktual dari badan dan lembaga pemerintah tertentu. Implementasi kebijakan itu sendiri sering disebut sebagai pelaksana dan kelompok sasaran. Pelaksana kebijakan adalah individu atau lembaga yang diakui secara resmi sebagai penanggung jawab pelaksanaan program. Kelompok sasaran adalah menunjuk para pihak yang dijadikan sebagai objek kebijakan.

Menurut Lester dan Stewart Jr. (dalam Agustino 2012:102) mengatakan implementasi ini adalah proses dan hasil. Keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian hasil akhir, yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang telah ditetapkan. Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward (dalam Indiahono 2009:143) menunjuk tempat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Keempat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, organisasi dan struktur birokrasi. Komunikasi menunjukkan bahwa kebijakan dilaksanakan dengan benar jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana program dengan kelompok sasaran. Tujuan program/kebijakan dapat ditentukan dengan tepat untuk menghindari distorsi kebijakan. Sumber daya, setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya manusia dan finansial yang memadai. Sumber daya manusia melimpah baik secara kualitas maupun kuantitas, dan jumlah pejabat

pelaksana yang cukup banyak, mencakup semua kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kemampuan untuk memenuhi modal untuk program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan saat mengimplementasikan program/kebijakan. Disposisi, merupakan karakter dan kualitas penting dari pelaksanaannya adalah kejujuran, komitmen dan demokrasi. Pelaksana yang berdedikasi dan jujur akan selalu mampu mengatasi hambatan program/kebijakan. Integritas menjaga pelaksana pada tingkat program yang ditentukan dalam kebijakan program. Struktur birokrasi menunjukkan bahwa pentingnya struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan, didalamnya mencakup dua hal penting, pertama adalah mekanisme pelaksanaan dan struktur organisasi itu sendiri, dan mekanisme pelaksanaan program biasanya dibentuk berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan dalam pedoman program/kebijakan. SOP yang baik memuat petunjuk-petunjuk yang jelas, sistematis, sederhana yang dapat dipahami oleh semua orang karena menjadi acuan dalam bekerja para pelaksana. Pada saat yang sama, organisasi administratif sebagian besar menghindari masalah yang membingungkan, panjang, dan rumit. Semuanya bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan, dan satu variabel sangat mempengaruhi yang lain. Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dari kebijakan. Pada fase ini ditentukan apakah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah di bidang ini benar-benar dilaksanakan dan berhasil mengarah pada keluaran dan hasil yang direncanakan. Output merupakan hasil dari kebijakan yang diharapkan muncul sebagai akibat langsung dari kebijakan tersebut. Output biasanya ditampilkan segera setelah kebijakan diimplementasikan. Hasil adalah efek yang diharapkan dari kebijakan setelah hasil kebijakan diumumkan. Hasil biasanya diukur setelah hasilnya dipublikasikan atau lama setelah kebijakan diimplementasikan. (Indiahono 2009:31).

Partisipasi

Konsep partisipasi dalam administrasi publik merupakan hal yang penting dalam mewujudkan hal yang penting dalam mewujudkan nilai demokrasi. Osborne dan Gaebler (dalam Muluk, 2007:33) mengungkapkannya ketika memasukkan prinsip "*reinventing government : empowering rather than serving*" Hal ini menunjukkan betapa pentingnya partisipasi masyarakat bagi pemerintah. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan. Hal ini akan mengubah persepsi partisipasi masyarakat sehingga masyarakat tidak lagi melihatnya sebagai kesempatan yang diberikan oleh negara melalui kemurahan hatinya, melainkan sebagai pelayanan dasar dan bagian integral dari pemerintah daerah. Partisipasi masyarakat dapat dipahami sebagai keikutsertaan masyarakat dalam program pembangunan dan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam rangka mencapai kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya untuk keberhasilan program pembangunan.

Kampung Keluarga Berencana

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, desa atau sederajat dengan kriteria tertentu, dimana program kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga serta bidang terkait terintegrasi secara sistematis dan sistematis. Satuan wilayah setingkat desa dengan kriteria khusus yang mengintegrasikan program KKBPK dan pengembangan industri terkait meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Republik Indonesia tentang Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Sebagai Dasar Penyelenggaraan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana diberikan kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) hak untuk fokus tidak hanya pada pengendalian penduduk tetapi juga pada pembangunan keluarga. Oleh karena itu, dalam rangka memantapkan program KKBPK 2015-2019, diharapkan BKKBN dapat mengembangkan kegiatan yang dapat meningkatkan upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang berdampak langsung serta bermanfaat bagi masyarakat. Secara umum tujuan kampung KB adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat desa atau sederajat dengan pengembangan program KKBPK dan bidang terkait lainnya untuk mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Selain peningkatan keterlibatan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga swasta, Kampung KB didirikan untuk mendukung, mendukung dan mendorong masyarakat dalam pelaksanaan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait, serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di kalangan penduduk pembangunan yang berorientasi.

Definisi Konsepsional

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan definisi konsepsional. Definisi konsepsional dari penelitian ini adalah sebagai berikut: implementasi Program Kampung Keluarga Berencana adalah penerapan dari program perencanaan keluarga yang disetujui oleh BKKBN, berkelanjutan dan menyeluruh untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kegiatan sosial yang diharapkan bagi masyarakat agar terwujudnya tujuan dari Program Keluarga Berencana.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Peneliti dapat mengetahui data mana yang perlu di ambil dari data yang sedang di kumpulkan. Adapun fokus dalam penelitian ini yaitu: 1. Implementasi Program Kampung KB di wilayah Rt. 01 Kelurahan Gunung Lingai Kota Samarinda, a) Komunikasi, b) Sumber Daya, c) Disposisi dan, d) Struktur Birokrasi. 2. Faktor Penghambat dan Pendukung implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Madu Kencana di RT 01 Kelurahan Gunung Lingai Kota Samarinda

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Key Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Penggerak dan Pengendalian (P2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda, dan selanjutnya yang menjadi Informan dalam penelitian ini adalah Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kelurahan Gunung

Lingai, Lurah Kelurahan Gunung Lingai dan ketua RT. 01 Kelurahan Gunung Lingai.

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Tinjauan Pustaka (*Library Research*), 2) Penelitian lapangan (*Field Work Research*). Dalam tahap penelitian lapangan ini dipergunakan teknik-teknik sebagai berikut: a) Dokumentasi, b) Observasi dan, c) Wawancara

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : metode analisis kualitatif model interaktif yaitu dengan mendeskripsikan serta menganalisis data yang telah di peroleh. Adapun analisis data yang digunakan ialah Model Miles dan Huberman. Analisis data model Miles, Huberman, dan Saldana dalam Sugiyono (2014:14) terdiri dari empat tahapan, yaitu: a) Pengumpulan Data; b) Kondensasi Data; c) Penyajian Data; dan d) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Program Kampung KB di wilayah Rt. 01 Kelurahan Gunung Lingai Kota Samarinda

Secara umum tujuan dibentuk kampung Keluarga Berencana adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Kampung KB dapat dijadikan sebagai wahana pemberdayaan masyarakat melalui berbagai macam program yang mengarah pada upaya mengubah sikap, perilaku, dan cara berpikir masyarakat kearah yang baik. Berikut penjelasan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan sub fokus penelitian yaitu:

1) Komunikasi dalam Implementasi Program Kampung KB di wilayah Rt. 01 Kelurahan Gunung Lingai Kota Samarinda

Dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas, dibentuk Kampung KB sesuai dengan kriteria wilayah tersebut untuk mengajak masyarakat berpartisipasi mengikuti kegiatan program tersebut dengan sosialisasi dan penyuluhan. Agar program tersebut berjalan sesuai dengan tujuan awal dan efektif maka diperlukan penelitian terhadap komunikasi pelaksanaan program tersebut.

Edward (Indiahono, 2009:143) mengatakan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran. Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Komunikasi dalam implementasi kebijakan publik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksana program/kebijakan. Tanpa komunikasi yang baik, implementasi program/kebijakan pasti akan terhambat. Sosialisasi dan penyuluhan telah terlaksana dengan baik, pelaksanaan kegiatan sosialisasi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan SOP. Namun, pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022

Kampung KB Madu Kencana menjadi semi-aktif merujuk pada tidak aktif dikarenakan kondisi pandemi covid-19 sehingga kegiatan yang mengumpulkan massa besar tidak diperbolehkan dan Kampung KB Madu Kencana terkena dampak tersebut. Selanjutnya, dari segi komunikasi antar pelaksana\ dalam Program Kampung KB Madu Kencana Kelurahan Gunung Lingai belum berjalan dengan baik, komunikasi yang terjadi antar pelaksana masih kurang antara satu sama lain, sehingga perkembangan dan permasalahan dari Kampung KB Madu Kencana kurang mendapat perhatian dan tidak adanya laporan rutin. Komunikasi implementasi Program Kampung KB Madu Kencana Kelurahan Gunung Lingai Kota Samarinda dapat dikatakan bahwa komunikasi sosialisasi dan penyuluhan telah berjalan, namun terhambat. Hal ini disebabkan masih kurang optimalnya komunikasi antar pelaksana karena perkembangan dan permasalahan Kampung KB Madu Kencana tidak dilaporkan secara berkala.

Komunikasi antar pelaksana program/kebijakan masih kurang baik, dikarenakan pihak Kepala Bidang Penyuluh dan Penggerak (P2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) hanya berkomunikasi dengan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kelurahan Gunung Lingai saja dan tidak berkomunikasi dengan pihak Kelurahan Gunung Lingai dan Ketua RT 01 selaku Ketua Kampung KB Madu Kencana. Sehingga Kepala Bidang Penyuluh dan Penggerak (P2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) tidak tahu kondisi lapangan dan permasalahan yang terjadi di Kampung KB Madu Kencana Kelurahan Gunung Lingai dan PLKB Kelurahan Gunung Lingai tidak melaporkan hal tersebut kepada Kepala Bidang Penyuluh dan Penggerak (P2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB). Kurang aktif peran masyarakat dalam Program Kampung KB Madu Kencana Kelurahan Gunung Lingai Kota Samarinda juga menjadi permasalahan, hal ini dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa Program Kampung KB hanya dilakukan pada wilayah tertentu saja dan berbanding balik dengan pelaksanaannya yang dimana Program Kampung KB dilaksanakan untuk Kelurahan Gunung Lingai. Dalam artian seluruh wilayah yang termasuk dalam lingkungan Kelurahan Gunung Lingai turut berpartisipasi dalam Program Kampung KB Madu Kencana

2) *Sumberdaya dalam Implementasi Program Kampung KB di wilayah Rt. 01 Kelurahan Gunung Lingai Kota Samarinda*

Sumberdaya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini sumberdaya menjadi salah satu fokus penelitian yang digunakan untuk menganalisis implementasi Program Kampung KB Madu Kencana Kelurahan Gunung Lingai Kota Samarinda. Menurut Edward (Indiahono, 2009:143) Sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas bagi pelaksana mencakup semua kelompok sasaran. Sumberdaya manusia dalam pelaksanaan Program Kampung KB Madu Kencana Kelurahan Gunung Lingai sebatas cukup memadai dikarenakan kurangnya partisipasi anggota yang tidak aktif dan latar belakang pendidikan. Selain itu, keaktifan kegiatan dalam program

Kampung KB Madu Kencana hanya kegiatan PIK/R saja. Kemudian Ketua Kampung KB kurang mampu mengayomi anggota dan masyarakat sekitar untuk keikutsertaan dalam Program Kampung KB. Dalam implementasi kebijakan publik, anggaran mengacu pada program untuk memastikan implementasi kebijakan atau program yang dilakukan oleh pemerintah, sebab tanpa dukungan sumberdaya anggaran yang memadai. Sumberdaya anggaran, bahwa anggaran yang telah disediakan telah mencukupi akan tetapi kurang dikelola dengan baik oleh Ketua RT selaku Ketua Kampung KB, dikarenakan anggaran untuk Program Kampung KB telah termasuk dalam anggaran probebaya yang dimana sebagian disisihkan untuk Program Kampung KB. Dan Kelurahan Gunung Lingai telah memfasilitasi dan menyediakan anggaran untuk renovasi sekretariat Kampung KB Madu Kencana melalui anggaran dana APBD sehingga layak digunakan untuk melakukan kegiatan. Selain itu, menurut Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kelurahan Gunung Lingai sumberdaya anggaran juga dapat diperoleh oleh iuran warga Kampung KB sehingga hasil iuran tersebut dapat mereka membeli sebuah barang dan barang tersebut mereka sewakan.

3) Disposisi dalam Implementasi Program Kampung KB di wilayah Rt. 01 Kelurahan Gunung Lingai Kota Samarinda

Disposisi merupakan sikap merupakan Karakteristik terkait erat dengan pelaksana kebijakan/program). Menurut Edward (Indiahono, 2009:143) Karakteristik penting dari pelaksana adalah kejujuran, komitmen dan demokrasi. Disposisi dalam implementasi Program Kampung KB Madu Kencana Kelurahan Gunung Lingai Kota Samarinda sudah berjalan dengan baik akan tetapi kurang maksimal dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya dari Kepala Bidang Penyuluh dan Penggerak (P2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) sudah menjalankan komitmen dengan memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada Kader-kader dan Ketua Kampung KB. Kemudian Kelurahan Gunung Lingai mendampingi serta mengawasi kegiatan Program Kampung KB dalam pelaksanaannya dan diikuti oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kelurahan Gunung Lingai dalam mengaktifkan kembali Program Kampung KB Madu Kencana Kelurahan Gunung Lingai sesuai dengan 8 fungsi keluarga yaitu, fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih orang tua, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosial dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan

4) Struktur Birokrasi dalam Implementasi Program Kampung KB di wilayah Rt. 01 Kelurahan Gunung Lingai Kota Samarinda

Struktur Birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward (Indiahono, 2009:143) Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti distribusi kekuasaan, hubungan antar organisasi/lembaga di dalam organisasi/lembaga tersebut dan hubungan antar organisasi/lembaga eksternal dll. Struktur birokrasi dalam implementasi Program Kampung KB Madu Kencana Kelurahan Gunung Lingai Kota Samarinda telah

dilaksanakan sesuai dengan *standar operating procedur* (SOP) dimana Kepala Bidang Penyuluh dan Penggerak (P2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPPKB telah melakukan pelatihan kepada Kader-kader dan Ketua Kampung KB, kemudian Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang melakukan penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan di wilayah RT 01 dan sekitar yang didampingi dan diawasi oleh Kelurahan Gunung Lingai, walaupun dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan maksimal. Dikarenakan, kurangnya komunikasi dan kerjasama antar pelaksana program sehingga hanya saling menutupi kekurangan dengan mengharapkan sumberdaya manusia yang tersedia. Kemudian, kurangnya perhatian dari masyarakat setempat membuat program tidak berjalan dengan maksimal. Kondisi kerjasama anggota pengurus Kampung KB kurang kompak dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsi dari masing-masing struktur pelaksana, akan tetapi kenyataannya di lapangan hanya sebagian dari keanggotaan Kampung KB yang aktif menggerakkan Program Kampung KB menjadi permasalahan di Kampung KB Madu Kencana.

Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Madu Kencana di RT 01 Kelurahan Gunung Lingai Kota Samarinda

Faktor penghambat merupakan sesuatu kejadian yang tidak di inginkan sehingga menyebabkan kendala dalam mencapai suatu tujuan. Faktor penghambat dalam penelitian ini dari segi komunikasi yakni komunikasi antar pelaksana program/kebijakan masih kurang baik. Serta sumberdaya manusia yang ada juga belum memadai untuk menjalankan program. Hal ini didukung dengan kurang aktifnya peran masyarakat dalam Program Kampung KB Madu Kencana Kelurahan Gunung Lingai Kota Samarinda juga menjadi permasalahan, hal ini dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa Program Kampung KB hanya dilakukan pada wilayah tertentu saja dan berbanding balik dengan pelaksanaannya yang dimana Program Kampung KB dilaksanakan untuk Kelurahan Gunung Lingai.

Faktor pendukung dalam pelaksanaan program/kebijakan program Kampung KB Madu Kencana Kota Samarinda diantaranya yakni masih adanya bantuan dana/anggaran operasional dari Kelurahan Gunung Lingai untuk memperbaiki wadah sekretariat Kampung KB sehingga layak digunakan untuk menopang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, serta komitmen pihak pelaksana Program Kampung KB yaitu mengaktifkan kembali Program Kampung KB Madu Kencana menjadi aktif dengan memfasilitasi kebutuhan yang berkaitan dengan Program Kampung KB Madu Kencana serta menyusun rencana kegiatan dan sosialisasi/penyuluhan.

Penutup

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini dari segi komunikasi yakni secara langsung belum dapat berjalan dengan baik dikarenakan *miss* komunikasi antara

pihak implementor atau pelaksana, Sumber daya merupakan indikator menunjukkan bahwa setiap kebijakan harus didukung dengan sumber daya yang memadai, dari segi sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta keuangan/finansial. Dalam pengelolaan Kampung KB Madu Kencana Sumber daya manusia belum memadai terutama berkaitan dengan kompetensi dari pengurus dalam pelaksanaan Program Kampung KB dan sumberdaya anggaran probebaya yang kurang dikelola oleh Ketua RT, Disposisi merupakan sikap dan karakteristik yang erat kaitannya dengan implementor atau pelaksana kebijakan/program, komitmen pihak pelaksana Program Kampung KB yang ingin mengaktifkan kembali Program Kampung KB Madu Kencana menjadi aktif, Struktur birokrasi merupakan bagian dari implementasi kebijakan. Mekanisme penyampaian program diatur dengan standar prosedur yang ditetapkan dalam kebijakan program. Standar Operasional Prosedur (SOP) harus memuat kerangka kerja yang dapat dipahami, sistematis, dan sederhana agar menjadi acuan pengelolaan Kampung KB Madu Kencana.

Saran

Perlunya musyawarah antar pelaksana dan instansi yang terkait dengan Kampung Keluarga Berencana (KB) Madu Kencana sehingga Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Madu Kencana bisa berjalan dan aktif kembali, terlebih lagi kegiatan dengan tatap muka langsung sudah diperbolehkan oleh pemerintah. Untuk kepengurusan perlu sumberdaya manusia yang mempunyai kompetensi di bidang masing masing sehingga program Kampung Keluarga Berencana (KB) bisa terlaksana dengan baik dan perlu juga dilakukan pelatihan kepada pengurus dan kader berkaitan dengan tugas mereka. Dan untuk anggaran probebaya seharusnya Ketua RT.01 selaku Ketua Kampung Keluarga Berencana (KB) Madu Kencana dapat menyisihkan dan mengelola untuk kegiatan Kampung Keluarga Berencana (KB). Untuk masyarakat yang ada di Kelurahan Gunung Lingai agar dapat aktif lagi dalam keikutsertaan Program Kampung Keluarga Berencana (KB) ialah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai program kampung Keluarga Berencana (KB), serta mampu membuka pemikiran mereka terhadap pentingnya kampung Keluarga Berencana (KB) untuk mensejahterakan kehidupan mereka.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, cv.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Penerbit Gaya.
- kampungkb.bkkbn.go.id. (n.d.). *Kampung KB Sebagai Wahana Pemberdayaan Masyarakat*. <https://Kampungkb.Bkkbn.Go.Id/About>. Retrieved July 10, 2020, from <https://kampungkb.bkkbn.go.id/about>
- kominfo.go.id. (2017). *Kampung KB: Inovasi Strategis Memberdayakan Masyarakat*.

- https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/9841/kampung-kb-inovasi-strategis-memberdayakan-masyarakat/0/artikel_gpr
- Laksana, N. S. (2013). *“Kebijakan dan Manajemen Publik Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa dalam Program Desa Siaga Di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”*. <https://repository.unair.ac.id/15098/>
- Mantra, I.B., 2003. *Demografi Umum Edisi Kedua*. Yogyakarta: Pustaka
- Miles, Matthew B, Dkk. n.d. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muluk, K. 2007. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah Malang*. Lembaga Penerbitan dan Dokumentasi FIA-Unibraw.
- UU Nomor 52 Tahun 2009. (2009a).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38852/uu-no-52-tahun-2009>
- UU Nomor 52 Tahun 2009. (2009b).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38852/uu-no-52-tahun-2009>
- Yulian Widya Saputra, Lukas, Titin A, Riska Susmei Rindantya. 2019. *“Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (Kb) Di Kota Samarinda.”* *Ejournal.Stikku.Ac.Id*.2019:27–33.
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1487580&val=12049&title=Implementasi%20Implementasi%20Program%20Kampung%20Keluarga%20Berencana%20KB%20di%20Kota%20Samarinda>